

## **ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI**

**Lala Novikasari<sup>1</sup>, Zulkarnain Zulkarnain<sup>2</sup>**

**Program Studi Akuntansi, Institut Manajemen Wiyata Indonesia<sup>1,2</sup>**

**Sukabumi, Indonesia**

lalanovikasari@gmail.com<sup>1</sup>, zulkarnain@imwi.ac.id<sup>2</sup>

### **ABSTRACT**

*Performance measurement is very important in evaluating the performance of local government officials or organizations in their efforts to provide services to the public. This study sought to provide an overview of the financial performance of the Sukabumi City Government as a region that has won the Unqualified Audit Opinion from the BPK-RI in five consecutive years. The research was conducted using a descriptive quantitative approach. Regional financial ratios were used to measure the financial performance in question. Based on the results of the analysis and discussion, it was found that the Sukabumi City Government was quite capable of financing development or operations in the government by self-financing; PAD has always increased from year to year; Others Legal PAD has the highest contribution in contributing to overall PAD revenue; the level of dependence of the Sukabumi City Government on the source of transfer income on average was in the "MEDIUM" category; the achievement of the annual target of the Sukabumi City Government's PAD has been very effective; and the capital expenditure ratio in the Sukabumi City Government was still low below the average capital expenditure ratio in the regional government.*

**Keywords: Regional Financial Performance, Financial Ratios Analysis, Sukabumi City**

### **PENDAHULUAN**

Otonomi daerah memberikan ruang yang sangat leluasa bagi setiap pemerintah daerah untuk mengembangkan daerahnya sendiri. Ruang ini diberikan karena dianggap pemerintah daerah lebih memahami situasi, kondisi, dan kebutuhan di daerahnya (Juliarini, 2019). Pemerintah pusat kemudian menuntut setiap pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintah sesuai prinsip *good governance* dan menjalankan prinsip akuntabilitas. Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggung-

jawaban kepada publik melalui LKPD untuk meningkatkan kredibilitas dan mewujudkan akuntabilitas, serta transparansi pengelolaan keuangan di daerah (Zulkarnain & Ningrum, 2020).

Melalui LKPD yang disampaikan ke publik kemudian dapat digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah (Mustafa & Halim, 2009). Pengukuran kinerja sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi kinerja pejabat atau organisasi pemerintah daerah dalam upayanya memberikan layanan kepada

publik, serta mewujudkan *good governance* di pemerintah daerah (Sartika, 2019).

Pemerintah Kota Sukabumi merupakan salah satu pemerintah kabupaten/kota di Indonesia yang berprestasi. Pada tahun 2019 menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan RI atas prestasinya secara lima kali berturut-turut meraih Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK-RI. Raihan Opini WTP tersebut dimulai sejak tahun 2014 hingga terkini tahun 2018 (Firdaus, 2019).

Sehubungan dengan raihan Opini WTP tersebut memunculkan pertanyaan, apakah hal tersebut juga mencerminkan kinerja keuangan yang baik dari Pemerintah Kota Sukabumi? Penelitian oleh Zulkarnain & Andriansyah (2018) menemukan bahwa pemerintah daerah yang mendapatkan Opini WTP tidak serta merta mencerminkan kinerja keuangan yang baik pula di pemerintah daerah tersebut. Opini audit yang baik dikatakan sebagai penilaian kualitas pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan, dan mencerminkan tercapainya *good governance* dari Pemerintah Daerah yang diaudit pada periode audit (Gunarwanto, 2017).

Penelitian ini berupaya untuk memberikan gambaran kinerja keuangan Pemerintah Kota Sukabumi. Penulis melihat belum ada penelitian sebelumnya yang

secara khusus melakukan penilaian kinerja keuangan di Pemerintah Kota Sukabumi. Alat ukur yang digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Kota Sukabumi menggunakan kombinasi dari alat ukur yang digunakan oleh Mustafa & Halim (2009), Sartika (2019), dan Zulkarnain (2020). Alat ukur dimaksud yaitu berupa rasio keuangan daerah diantaranya, rasio derajat desentralisasi fiskal (DDF), rasio pertumbuhan PAD, rasio kontribusi pajak daerah & retribusi daerah terhadap PAD, rasio ketergantungan keuangan pemerintah daerah, rasio efektivitas PAD, dan rasio belanja modal.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan bersifat kuantitatif deskriptif, yaitu dengan melakukan perhitungan data-data keuangan daerah terpilih dan menguraikan dalam bentuk narasi hasil temuan yang diperoleh. Studi pustaka juga dilakukan melalui reviu atas publikasi seperti artikel jurnal, dan/atau publikasi lainnya yang dapat dijadikan sebagai referensi. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Sukabumi tahun 2014-2018 yang dipublikasikan melalui laman web [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id). Perhitungan

data-data keuangan dari LRA Pemerintah Kota Sukabumi dilakukan dengan rumus-rumus rasio keuangan sebagai berikut:

**Tabel 1 Rumus Rasio Keuangan**

No.	Rumus Rasio Keuangan	Penjelasan Skala Interval	
		%	Kemampuan Keuangan
1.	<b>Derajat Desentralisasi Fiskal</b>  $= \frac{\text{Total Realisasi PAD tahun } t}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah tahun } t}$	0 – 10	Sangat Kurang
		10 – 20	Kurang
		20 – 30	Cukup
		30 – 40	Sedang
		40 – 50	Baik
		> 50	Sangat Baik
2.	<b>Pertumbuhan PAD</b>  $= \frac{\text{Total Realisasi PAD tahun } t}{\text{Total Realisasi PAD tahun } t - 1} - 1$		
3.	<b>Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD</b>  $= \frac{\text{Total Realisasi Pajak Daerah tahun } t}{\text{Total Realisasi PAD tahun } t}$		
	<b>Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD</b>  $= \frac{\text{Total Realisasi Retribusi Daerah tahun } t}{\text{Total Realisasi PAD tahun } t}$		
4.	<b>Ketergantungan Keuangan Pemda</b>  $= \frac{\text{Total Realisasi Pendapatan Transfer tahun } t}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah tahun } t}$	0 – 25	Sangat Rendah
		25 – 50	Rendah
		50 – 75	Sedang
		75 – 100	Tinggi
5.	<b>Efektivitas PAD</b>  $= \frac{\text{Total Realisasi PAD tahun } t}{\text{Total Anggaran PAD tahun } t}$	%	Kategori
		< 75	Tidak Efektif
		75 – 89	Kurang Efektif
		90 – 99	Cukup Efektif
		100	Efektif
		> 100	Sangat Efektif
6.	<b>Rasio Belanja Modal</b>  $= \frac{\text{Total Realisasi Belanja Modal tahun } t}{\text{Total Realisasi Belanja Daerah tahun } t}$		

Sumber: UGM (1991), Mustafa & Halim (2009), Sartika (2019), Zulkarnain (2020)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Sukabumi

Informasi terkait pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota

Sukabumi yang ditunjukkan dengan realisasi pendapatan dan belanja daerah, serta pembiayaan daerah tahun 2014-2018 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2 Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2014-2018**

URAIAN	TAHUN (Dalam Satuan Jutaan Rupiah)				
	2018	2017	2016	2015	2014
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1,223,767</b>	<b>1,216,205</b>	<b>1,163,015</b>	<b>1,066,746</b>	<b>996,915</b>
Pendapatan Asli Daerah	362,342	359,024	295,258	276,846	258,467
Pendapatan Transfer	795,336	767,421	800,447	726,034	709,999
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	66,090	89,760	67,311	63,866	28,448
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1,185,870</b>	<b>1,160,219</b>	<b>1,155,744</b>	<b>1,057,842</b>	<b>917,116</b>
Belanja Operasi	1,045,043	941,863	948,075	890,221	799,519
Belanja Modal	140,101	217,077	205,502	166,213	116,080
Belanja Lain-lain	11	1,279	1,452	673	918
Transfer	715	-	715	736	599
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>37,897</b>	<b>55,985</b>	<b>7,271</b>	<b>8,903</b>	<b>79,799</b>
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>128,292</b>	<b>77,434</b>	<b>73,111</b>	<b>111,024</b>	<b>38,916</b>
Penerimaan Pembiayaan	136,819	80,862	119,927	119,285	42,916
Pengeluaran Pembiayaan	8,527	3,428	46,816	8,260	4,000
<b>SiLPA</b>	<b>166,189</b>	<b>133,419</b>	<b>80,382</b>	<b>119,927</b>	<b>118,715</b>

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id, data update 28 Januari 2020 (diolah)

Tabel 2 di atas menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2014 - 2018 pendapatan daerah (122,76%) dan belanja daerah (129,30%) Pemerintah Kota Sukabumi. Termasuk pula di dalamnya peningkatan pada PAD (140,19%). Besar persentase peningkatan PAD ini lebih besar dibanding peningkatan pendapatan daerah secara keseluruhan ataupun pendapatan transfer (112,02%). Walaupun secara nominal masih dipandang rendah, dimana lebih kurang sebesar Rp300 Miliar (tahun

2018) merupakan kontribusi RSUD R Syamsudin SH, potensi PAD dari sektor lainnya dianggap masih bisa dimaksimalkan (Bastiandy, 2018)

### *Analisis Rasio Derajat Desentralisi Fiskal (DDF)*

Rasio DDF menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai Belanja Daerah dari hasil realisasi PAD. Di bawah ini disajikan Rasio

DDF Pemerintah Kota Sukabumi tahun  
2014-2018:

**Tabel 3 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)  
Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2014-2018**

<b>TAHUN</b>	<b>PAD</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>DDF (%)</b>	<b>KEMAMPUAN KEUANGAN</b>
2014	258,467,192,313	996,914,566,265	25.93%	Cukup
2015	276,845,561,835	1,066,745,506,697	25.95%	Cukup
2016	295,257,670,781	1,163,015,041,941	25.39%	Cukup
2017	359,024,019,506	1,216,204,685,623	29.52%	Cukup
2018	362,342,290,539	1,223,767,356,844	29.61%	Cukup
<b>Rata-rata</b>			<b>27.28%</b>	<b>Cukup</b>

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id, data update 28 Januari 2020 (diolah)

Tabel 3 di atas menunjukkan perkembangan rasio DDF Pemerintah Kota Sukabumi dari tahun 2014 - 2018 cenderung meningkat, namun tidak signifikan. Rasio tersebut dalam lima tahun masih tetap berada pada kelompok "CUKUP". Dapat diartikan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Sukabumi dalam membiayai pembangunan atau operasional di pemerintahan "CUKUP" oleh pembiayaan sendiri. Pada tahun 2019 sebagai upaya untuk meningkatkan PAD ditetapkan Peraturan Daerah terkait Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Sukabumi dan Perusahaan Umum

Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi. Diharapkan dengan perkembangan BPR dan PDAM itu nantinya dapat memberi manfaat bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat (Iman & Hafil, 2019).

#### ***Analisis Rasio Pertumbuhan PAD***

Rasio ini menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan sampai meningkatkan pemungutan PAD periode ke periode. Di bawah ini disajikan Rasio Pertumbuhan PAD Pemerintah Kota Sukabumi tahun 2014-2018

**Tabel 4 Rasio Pertumbuhan PAD Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2014-2018**

TAHUN	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	Lain-lain PAD yang Sah	PAD
2014	34.23%	9.70%	3.56%	52.95%	47.24%
2015	4.54%	0.79%	-5.63%	7.99%	7.11%
2016	40.01%	-20.78%	6.43%	3.69%	6.65%
2017	4.33%	0.69%	5.81%	25.57%	21.60%
2018	28.54%	-4.84%	-10.58%	-2.71%	0.92%

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id, data update 28 Januari 2020 (diolah)

Tabel 4 di atas menunjukkan secara total dari tahun 2014-2018 PAD Pemerintah Kota Sukabumi selalu mengalami peningkatan, walaupun peningkatannya fluktuatif. Peningkatan besar pada tahun 2017 berasal dari komponen Lain-lain PAD yang Sah, yaitu berasal dari Pendapatan dari Rumah Sakit Umum Daerah (Sumardi, 2017). Pada tahun 2018 terjadi penurunan pada Retribusi Daerah dikarenakan dihapusnya beberapa jenis retribusi, salah satunya yaitu Retribusi Angkutan Kota (Angkot) sebagai salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Kota Sukabumi terhadap Pengusaha dan Sopir Angkot,

dikarenakan penghasilan yang mengalami penurunan oleh perkembangan zaman dan persaingan dengan Angkutan *Online* (Sumardi, 2018a).

#### ***Analisis Rasio Kontribusi Pajak Daerah & Retribusi Daerah Terhadap PAD***

Rasio ini menggambarkan tingkat andil pembayaran pajak daerah maupun retribusi daerah oleh masyarakat terhadap penerimaan PAD secara keseluruhan. Di bawah ini disajikan Rasio Kontribusi Pajak Daerah & Retribusi Daerah terhadap PAD Pemerintah Kota Sukabumi tahun 2014-2018:

**Tabel 5 Rasio Kontribusi Pajak Daerah & Retribusi Daerah Terhadap PAD  
Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2014-2018**

TAHUN	Pajak Daerah		Retribusi Daerah		PAD
	Jumlah	%	Jumlah	%	
2014	28,399,453,587	10.99%	10,889,136,325	4.21%	258,467,192,313
2015	29,688,546,027	10.72%	10,975,693,725	3.96%	276,845,561,835
2016	41,565,643,464	14.08%	8,695,308,540	2.94%	295,257,670,781
2017	43,365,617,424	12.08%	8,755,114,704	2.44%	359,024,019,506
2018	55,741,158,384	15.38%	8,331,404,580	2.30%	362,342,290,539
<b>Rata-rata</b>		<b>12.65%</b>		<b>3.17%</b>	

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id, data update 28 Januari 2020 (diolah)

Tabel 5 di atas menunjukkan andil yang rendah dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah menyumbang penerimaan PAD secara keseluruhan, yaitu masing-masing sebesar rata-rata 12,65% dan 3,17%. Penyumbang PAD terbesar berasal dari Lain-lain PAD yang Sah (rata-rata tahun 2014-2018 sebesar 82,97%), diantaranya berasal dari Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan (JKN), Dana Non Kapitasi JKN, dan Pendapatan Jasa Giro.

Jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi pada pembentukan kumulatif pajak daerah adalah dari BPHTB, PBB, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran, dan Pajak Hotel. Topangan Sukabumi sebagai daerah yang memiliki banyak destinasi wisata alam menyumbang pada besaran pajak daerah (Permana, 2019). Namun kondisi terkini terkait Covid-19 memukul industri ini, membuat penerimaan pajak

daerah dari pajak restoran dan pajak hotel diantaranya, menurun drastis (Antara, 2020). Adapun penerimaan dari BPHTB dan PBB tidak terpengaruh oleh pandemi Covid-19 ini (Firdaus, 2020). Sedangkan jenis retribusi daerah yang memberikan kontribusi pada pembentukan kumulatif retribusi daerah adalah dari retribusi jasa usaha - pemakaian kekayaan daerah dan retribusi perizinan tertentu - izin mendirikan bangunan.

#### ***Analisis Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah***

Rasio ini menggambarkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah akan sumber pendapatan transfer, baik transfer dari pemerintah pusat maupun transfer antar daerah. Di bawah ini disajikan Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Sukabumi tahun 2014-2018:

**Tabel 6 Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah  
 Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2014-2018**

TAHUN	PENDAPATAN TRANSFER	PENDAPATAN DAERAH	%	KETERGANTU- NGAN
2014	709,999,109,287	996,914,566,265	71.22%	Sedang
2015	726,034,058,017	1,066,745,506,697	68.06%	Sedang
2016	800,446,550,235	1,163,015,041,941	68.83%	Sedang
2017	767,420,650,814	1,216,204,685,623	63.10%	Sedang
2018	795,335,506,859	1,223,767,356,844	64.99%	Sedang
<b>Rata-rata</b>			<b>67.24%</b>	<b>Sedang</b>

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id, data update 28 Januari 2020 (diolah)

Tabel 6 di atas menggambarkan tingkat ketergantungan Pemerintah Kota Sukabumi akan sumber pendapatan transfer secara rata-rata masuk kategori “SEDANG”. Tren tingkat ketergantungan dari tahun 2014-2018 menurun. Adapun jenis transfer terbesar yang diterima dari pemerintah pusat yaitu dari Dana Alokasi Umum (DAU). Pada tahun 2014 persentase DAU dari total pendapatan daerah sebesar 68,30%. Lalu berangsur-angsur secara

persentase DAU tersebut berkurang menjadi 62,35% pada tahun 2018.

***Analisis Rasio Efektivitas PAD***

Rasio ini menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target tahunan PAD dalam APBD. Di bawah ini disajikan Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Kota Sukabumi tahun 2014-2018:

**Tabel 7 Rasio Efektivitas PAD  
 Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2014-2018**

TAHUN	TARGET PAD	REALISASI PAD	%	KETERGANTU- NGAN
2014	201,242,474,205	258,467,192,313	128.44%	Sangat Efektif
2015	268,755,469,000	276,845,561,835	103.01%	Sangat Efektif
2016	339,578,789,300	295,257,670,781	86.95%	Kurang Efektif
2017	323,873,251,431	359,024,019,506	110.85%	Sangat Efektif
2018	351,290,601,720	362,342,290,539	103.15%	Sangat Efektif
<b>Rata-rata</b>			<b>106.48%</b>	<b>Sangat Efektif</b>

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id, data update 28 Januari 2020 (diolah)

Tabel 7 di atas menunjukkan telah sangat efektifnya realisasi target tahunan PAD Pemerintah Kota Sukabumi. Beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka memaksimalkan pemungutan pajak diantaranya dengan memasang *Tapping Box* atau alat pencatat transaksi di setiap wajib pajak di Kota Sukabumi, termasuk juga Aplikasi PANTAS (Pajak Online Kota Sukabumi) (Sumardi, 2018b).

#### ***Analisis Rasio Belanja Modal***

Rasio ini menggambarkan besar pengeluaran pemerintah untuk pengadaan aset tetap yang dapat memberi manfaat

dalam lebih dari satu tahun anggaran. Jenis pengadaan aset tetap meliputi pertama, pengadaan aset tetap yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, seperti untuk pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, dan seterusnya. Kedua, pengadaan aset tetap yang secara langsung tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, yaitu untuk menunjang operasional kegiatan pemerintahan, seperti untuk pembangunan gedung pemerintahan, kendaraan dinas operasional, dan seterusnya. Di bawah ini disajikan Rasio Belanja Modal Pemerintah Kota Sukabumi tahun 2014-2018:

**Tabel 8 Rasio Belanja Modal  
Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2014-2018**

<b>TAHUN</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>%</b>
2014	116,080,255,515	917,115,741,592	12.66%
2015	166,212,543,933	1,057,842,417,761	15.71%
2016	205,502,294,155	1,155,744,384,389	17.78%
2017	217,077,378,623	1,160,219,417,015	18.71%
2018	140,100,688,338	1,185,870,308,688	11.81%
<b>Rata-rata</b>			<b>15.33%</b>

Sumber: [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id), data update 28 Januari 2020 (diolah)

Tabel 8 di atas menunjukkan masih rendahnya rasio belanja modal di Pemerintah Kota Sukabumi, yaitu baru sebesar rata-rata 15,33%. Jumlah ini di bawah rata-rata belanja modal di pemerintah daerah sebesar 20% (Mahmudi, 2016). Sebagai perbandingan pemerintah daerah

lainnya di Jawa Barat yang memiliki rasio belanja modal tertinggi yaitu Pemerintah Kota Depok, dengan rasio belanja modal sebesar 27,86% pada tahun 2018 (Zulkarnain, 2020).

## SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran kinerja keuangan Pemerintah Kota Sukabumi berdasarkan analisis rasio keuangan daerah. Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

- 1) Kemampuan keuangan Pemerintah Kota Sukabumi dalam membiayai pembangunan atau operasional di pemerintahan “CUKUP” oleh pembiayaan sendiri;
- 2) Secara total PAD Pemerintah Kota Sukabumi dari tahun 2014-2018 selalu mengalami peningkatan. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2017 yang berasal dari komponen Lain-lain PAD yang Sah, yaitu dari Pendapatan BLUD RSUD R Syamsudin S.H.;
- 3) Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah rendah dalam menyumbang penerimaan PAD secara keseluruhan. Kontribusi tertinggi berasal dari Lain-lain PAD yang Sah;
- 4) Tingkat ketergantungan Pemerintah Kota Sukabumi akan sumber pendapatan transfer secara rata-rata masuk kategori “SEDANG”. Jenis transfer tertinggi dari pemerintah pusat yaitu DAU;

- 5) Pencapaian target tahunan PAD Pemerintah Kota Sukabumi telah sangat efektif. Pemerintah Kota Sukabumi memasang *Tapping Box* di setiap wajib pajak di Kota Sukabumi; dan
- 6) Rasio belanja modal di Pemerintah Kota Sukabumi masih rendah di bawah rata-rata rasio belanja modal di pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antara. (2020). *Pemkot Sukabumi Pangkas Pajak Hotel dan Restoran 25 Persen*. Cnnindonesia.Com.  
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200526064837-532-506855/pemkot-sukabumi-pangkas-pajak-hotel-dan-restoran-25-persen>
- Bastiandy, B. (2018). *DPRD Kota Sukabumi Nilai Pemkot Loyo Genjot Potensi Pajak*. Mediaindonesia.Com.  
<https://mediaindonesia.com/read/detail/177029-dprd-kota-sukabumi-nilai-pemkot-loyo-genjot-potensi-pajak>
- Firdaus, I. (2019). *Pemkot Raih Opini WTP Lima Kali Berturut-turut*. Pelitasukabumi.Com.  
<https://pelitasukabumi.com/2019/11/20/4330/kota-sukabumi/pemkot-raih-opini-wtp-lima-kali-berturut-turut/>
- Firdaus, I. (2020). *Pendapatan Pajak Hotel dan Restoran Terjun Bebas*. Pelitasukabumi.Com.  
<https://pelitasukabumi.com/2020/07>

- /06/8910/kota-sukabumi/pendapatan-pajak-hotel-dan-restoran-terjun-bebas/
- Gunarwanto. (2017). *Opini WTP dan Korupsi*. Bpk.Go.Id. <https://www.bpk.go.id/news/opini-wtp-dan-korupsi>
- Iman, R. N., & Hafil, M. (2019). *Genjot PAD, DPRD Kota Sukabumi Setujui Empat Raperda*. Republika.Co.Id. <https://republika.co.id/berita/nasiona/daerah/19/07/03/putu5e430-genjot-pad-dprd-kota-sukabumi-setujui-empat-raperda>
- Juliarini, A. (2019). Kinerja Pendapatan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Studi Kasus Provinsi Di Pulau Jawa. *Jurnal Good Governance*, 15(1).
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Mustafa, B., & Halim, A. (2009). Pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 7(4), 792–802.
- Permana, A. (2019). *Wisata Kota Sukabumi Menggeliat, Kontribusi PAD Diyakini Meningkat*. Sukabuminow.Com. <https://sukabuminow.com/wisata-kota-sukabumi-menggeliat-kontribusi-pad-diyakini-meningkat/>
- Sartika, N. (2019). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 7(2), 147–153.
- Sumardi, E. (2017). *PAD Kota Sukabumi Mengalami Peningkatan Menjadi Rp361,1 Miliar*. Portal.Sukabumikota.Go.Id. <https://portal.sukabumikota.go.id/2931/pad-kota-sukabumi-mengalami-peningkatan-menjadi-rp-3611-milyar/>
- Sumardi, E. (2018a). *Mulai Tahun 2018 PAD Kota Sukabumi Berkurang Sebesar Rp1 Miliar Per Tahun*. Portal.Sukabumikota.Go.Id. <https://portal.sukabumikota.go.id/3883/mulai-tahun-2018-pad-kota-sukabumi-berkurang-sebesar-rp-1-milyar-per-tahun/>
- Sumardi, E. (2018b). *Wakil Wali Kota Sukabumi Melaunching Tapping Box dan Aplikasi Pantas*. Portal.Sukabumikota.Go.Id. <https://portal.sukabumikota.go.id/7488/wakil-wali-kota-sukabumi-melaunching-tapping-box-dan-aplikasi-pantas/>
- UGM, F. (1991). Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab. In *Laporan Akhir Penelitian*.
- Zulkarnain, Z. (2020). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *Cakrawala*, 3(1), 61–74.

Zulkarnain, Z., & Andriansyah, R. (2018).  
Opini Audit BPK-RI dan Substansi  
Kinerja Keuangan Pemerintah  
Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi  
Kalimantan Barat. *Cakrawala*, 1(1),  
58–74.

Zulkarnain, Z., & Ningrum, D. A. (2020).  
Determinan Kualitas Laporan  
Keuangan Pemerintah Daerah Kota  
Sukabumi. *Syntax Literate: Jurnal  
Ilmiah Indonesia*, 5(5), 197–211.  
[https://doi.org/10.36418/syntax-  
literate.v5i5.1161](https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i5.1161)